

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	: 6
A. Latar Belakang	: 6
B. Tugas pokok dan fungsi	: 7
C. Struktur Organisasi	: 8
D. Sistematika Penyajian	: 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	: 11
A Rencana Strategis Polres Lombok Barat	: 11
B Penetapan Kinerja Polres Lombok Barat	: 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	: 19
A. Capaian Kinerja	: 19
B. Realisasi Anggaran	: 45
BAB IV P E N U T U P	: 48
A. Kesimpulan	: 48
B. Saran dan tindak lanjut	: 48
LAMPIRAN :	
1. PERJANJIAN KINERJA	
2. PENGUKURAN KINERJA	
3. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Lombok Barat telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dukungan anggaran tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Polri khususnya Polres Lombok Barat dapat terselesaikan dengan baik sesuai apa yang direncanakan dan tepat waktu, Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, tujuan dan indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan yang selaras guna menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Polres Lombok Barat selama tahun 2016.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Lombok Barat Tahun 2016 ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian untuk menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah dimasa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Polres Lombok Barat dibuat sebagai Pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, sehingga dapat menentukan arah kebijakan Pimpinan serta menjadi acuan kinerja untuk meningkatkan prestasinya ditahun berikutnya.

Gerung, 25 Januari 2017
Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat

IWAYAN SIARTANA S.H., S.IK., M.Si.
KBP NRP 76080839

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Polres Lombok Barat (LKIP) Tahun 2016 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Polres Lombok Barat Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Polres Lombok Barat Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2016, Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Polres Lombok Barat diantaranya :

- 1) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan indikator :
 - a) Prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata.
 - b) Prosentase penurunan daerah rawan kamtibmas.
 - c) Prosentase penurunan wilayah konflik sosial.
- 2) Terwujudnya penyebaran personel di seluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator :
 - a) Prosentase penyebaran personel di masing-masing Polsek.
 - b) Prosentase ideal jumlah Polsek.
 - c) Prosentase jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa.
- 3) Terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan indikator :
 - a) Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana.
 - b) Prosentase surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
- 4) Terwujudnya peningkatan pelayanan Kepolisian secara mudah, responsive, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi dengan indikator :
 - a) Prosentase ketepatan datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai standar dalam Kota atau luar Kota.
 - b) Prosentase Komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
- 5) Terwujudnya partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dengan indikator :
 - a) Prosentase Mou yang efektif.
 - b) Prosentase informasi masyarakat yang tindak lanjuti.
 - c) Menurunnya perilaku main hakim sendiri.
- 6) Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dengan indikator :

- a) Prosentase penurunan jumlah pelanggaran lalulintas.
- b) Prosentase penurunan Laka Lantas.
- c) Prosentase penurunan daerah rawan macet.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis Polres Lobar diantaranya :

- 1) Jumlah Polsek di jajaran Polres Lombok Barat sebanyak 7 Polsek dan 1 Polsubsektor dengan penyebaran personel belum merata sepenuhnya dan baru terisi rata-rata 80 % dari DSP sehingga Polsek kuat dan pusat sebaran pelayanan belum sepenuhnya optimal.
- 2) Jumlah anggota Bhabinkamtibmas yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada sehingga Polsek sebagai basis deteksi dini dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
- 3) Belum meratanya kekuatan dan kemampuan anggota terutama anggota Polsek sehingga untuk kasus –kasus tertentu masih harus diselesaikan oleh Polres/Polda.
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian dan belum dan belum tercukupinya kebutuhan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki tidak dapat dipergunakan dalam waktu yang relative lama.
- 5) Terbatasnya dukungan BBM sehingga operasional kendaraan untuk pelaksanaan patrol belum optimal.
- 6) Masih terbatasnya jumlah anggota yang mempunyai dan miliki kompetensi/kemampuan dalam menghadapi kejahatan cyber crime, money laundering, womwns trafficking, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, seapiracy, terorisme, perdagangan gelap Senpi dan Perdagangan gelap Narkoba.
- 7) Masih rendahnya kemampuan anggota dalam penguasaan bahasa asing, teknologi berbasis computer, teknologi dan bio kimia dibidang kriminalitas modern, pengetahuan bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter / perdagangan, bisnis dan lingkungan hidup yang makin dituntut menghadapi perubahan pola kejahatan nasional.
- 8) Masih adanya anggota yang berperilaku tercela dan melakukan tindak pidana sehingga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat.
- 9) Belum seluruhnya laporan masyarakat ditindak lanjuti secara cepat dan tepat serta dilengkapi dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sehingga masyarakat pelopor tidak mengetahui perkembangan kasus yang dilaporkan.
- 10) Masih adanya pengaduan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja anggota sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Sedang upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif, Porsonel Polres Lombok Barat yang sudah tergelar sebanyakorang yang tersebar di Satuan Fungsi Mapolres dan di Satuan Kewilayahan (Polsek) yaitu sebanyak 3 Bag, 8 Sat, 5 Si, 1 SPKT, 7 Polsek dan 1 Polsubsektor. Polsek meliputi Polsek Urban sebanyak 1, Polsek Rural sebanyak 3, Polsek Prarural sebanyak 3 dan 1 Polsubsektor, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Polri Polsek diproyeksikan sebagai pusat sebaran pelayanan. Demikian juga potensi masyarakat yang ikut Serta berpartisipasi yang tergabung dalam kelompok pengamanan swakarsa, komunitas-komunitas, tokoh masyarakat serta masyarakat secara umum ikut berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga sangat membantu Polres Lombok Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Polres Lombok Barat juga melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Polri dengan sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri sehingga dalam pencapaian Renstra Polres Lombok Barat Tahun 2015-2019 dengan mengedepankan delapan area perubahan diantaranya adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan mind set dan culture set aparatur sehingga dengan adanya program Reformasi Birokrasi Polri dapat mengawal tugas dan fungsi Polres Lombok Barat. Melalui Laporan Kinerja (LKIP) Polres Lombok Barat Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



LAPORAN KINERJA POLRES LOMBOK BARAT 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepolisian Resort Lombok Barat merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, Dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Polres Lombok Barat terus berupaya melakukan sinergi dengan segenap komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi Lombok Barat yang aman dan Kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa ada diikuti rasa takut dan khawatir yang timbul dari situasi dan kondisi yang tidak aman.

Dengan era Reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Kepolisian Resort Lombok Barat senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar Reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut Polres Lombok Barat yang juga bagian dari instansi pemerintahan telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang- Undag No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai tindak lanjut TAP MPR RI dan Undang- Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Polres Lobar. maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Polres Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Polres Lombok Barat

Kepolisian Resort Lombok Barat mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam daerah hukum Polres Lombok Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Polres Lombok Barat

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Polres Lombok Barat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pemberian pelayanan kepolisi kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindak anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
- 4) Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan Patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus

yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

- 5) Pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Peraturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Lalu Lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 6) Pelaksanaan Kepolisian Perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- 7) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Personel Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksana tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan;
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi Polres Lombok Barat

Untuk mengemban tugas pokok, fungsi susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Polres Lombok Barat, Kepala Kepolisian Polres Lombok Barat di bantu oleh :

1. Susunan Organisasi Polres terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan
 - b. Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan
 - c. Unsur Pelaksana tugas Pokok
 - d. Unsur Pendukung
 - e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan
2. Unsur Pimpinan terdiri dari :
 - a. Kapolres

- b. Wakil Kapolres (Wakapolres)
3. Unsur Pengawas dari Pembantu Pimpinan terdiri atas :
- a. Bag ops
 - b. Bag Ren
 - c. Bag Sumda
 - e. Siwas
 - f. Sipropam
 - g. Sium
 - h. Sikeu
4. Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri atas :
- a. SPKT
 - b. SatIntelkam
 - c. SatReskrim
 - d. SatResnarkoba
 - e. SatBinmas
 - f. SatSabhara
 - g. SatLantas
 - h. SatPolair
 - i. SatTahti
5. Unsur Pendukung Tugas Pokok adalah Sitipol
6. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan adalah Polsek
7. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Polres berdasarkan Tipologi sebagai tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Polres Lombok Barat tahun 2016 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dari Sistematika Penyajian.

BAB II : Perencana dan Perjanjian Kinerja, membuat tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.

BAB III : Akuntabilitas Keuangan, membuat tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Indikator kinerja Utama, Indikator Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup, membuat tentang Kesimpulan dari Saran Tindak Lanjut, Lampiran- lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polres Lombok Barat

Rencana Strategi (Renstra) Polres Lombok Barat tahun 2015-2019 merupakan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam waktu kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2016 adalah tahun Kedua pelaksanaan Renstra Polres Lombok Barat Tahun 2015-2019. Secara substantive Rencana Strategis Polres Lombok Barat memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Visi Polres Lombok Barat

Tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat disemua titik dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan di wilayah Lombok Barat dan Lombok Utara.

2. Misi Polres Lombok Barat

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasional penyidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan ketertiban kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- e. Mengembangkan Kepolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
- h. Membangun system sinergi polisian polisional interdepartemen/lembaga dan komponen masyarakat dalam rangka membangun dan memelihara kemitraan dan jejaringan kerja (networking).

3. Tujuan

- a. Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
- b. Terbangunnya kerjasama dengan masyarakat dalam wadah pemolisian Masyarakat (Polmas) dan dalam Sistem Sinergi Polisional Inter Departemen (Sis kewilayahan).
- c. Tergelarnya operasional Polri baik pre-emptif maupun preventif pada satuan kewilayahan.
- d. Tertanggulangnya trend perkembangan kejahatan, meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan Negara dan yang berimplikasi kontijensi.
- e. Terjaminnya roda pemerintah dan roda demokrasi yang kondusif baik tingkat pusat maupun daerah agar tercipta system pemerintah yang kredibel.
- f. Terwujudnya keamanan di wilayah hukum Polres Lombok Barat yang semakin kondusif dalam rangka peningkatan ekonomi dalam negeri.
- g. Ikut serta mendorong dan menciptakan iklim usaha yang dipercaya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- h. Tergelarnya struktur organisasi Polri yang berorientasi pada tugas pokok Polri dan pelayanan dengan memperhatikan postur kekuatan Polri yang telah tergelar yaitu semakin ramping di tingkat atas, penguatan tingkat menengah pada Pores, Serta makin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan di bawah pada tingkat Polres dan Polsek sebagai tolak ukur remunerasi.

4. Sasaran Strategis Polres Lombok Barat

- a. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbatas dari gangguan Kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan indikator :
 - 1) Prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata.
 - 2) Prosentase penurunan daerah rawan kamtibmas.
 - 3) Presentase penurunan wilayah konflik sosial.
- b) Terwujudnya penyebaran personel di seluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator :
 - 1) Prosentase penyebaran personel di masing-masing Polsek.
 - 2) Prosentase ideal jumlah Polsek.
 - 3) Prosentase jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa.
- c) Terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan indikator :
dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan indikator:

- 1) Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana .
 - 2) Prosentase surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
- d) Terwujudnya peningkatan pelayanan Kepolisian secara mudah, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi dengan indikator :
- 1) Prosentase ketepatan datang ketempat kejadian perkara (TPK) sesuai standar dalam kota atau luar Kota.
 - 2) Prosentase komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
- e) Terwujudnya partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dengan indikator :
- 1) Prosentase Mou yang efektif.
 - 2) Prosentase informasi masyarakat yang ditindaklanjuti.
 - 3) Prosentase menurunnya perilaku main hakim sendiri.
- f) Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dengan indikator :
- 1) Prosentasinya penurunan jumlah pelanggaran lalulintas.
 - 2) Prosentase penurunan Laka Lamtas.
 - 3) Prosentase penurunan daerah rawan macet.

B. Penetapan Kinerja Polres Lombok Barat.

Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/102/11/2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang Buku Pedoman Penetapan Kinerja Tingkat Satker di lingkungan Polri. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang memprestasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam waktu kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian harga dan sanksi (*reward and punishment*).

Polres Lombok Barat membuat Penetapan Kinerja tahun 2016, kegiatan yang disusun dalam Penetapan Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Polres Lombok Barat, penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur

evaluasi akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan Kinerja Polres Lombok Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri, Menyelenggarakan fungsi manajemen yang berintegritas dan berpihak pada perlindungan masyarakat melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegritas antara Mabes Polri, Polda NTB dan Polres Lombok Barat.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Polri, Tujuannya untuk terpenuhinya kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa di lingkungan Polres Lombok Barat.
- c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri, Sasarannya adalah terciptanya Layanan Pengaduan Masyarakat Pelanggar Kode Etik, Disiplin dan Pengamanan Internal Kewilayahan.
- d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban, Mengembangkan langkah-langkah strategi, mulai dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas samapai pada penanggulangan penyebab kejahatan dan konflik di masyarakat dan sektor ipoleksosbudkam.
- e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, Tujuannya adalah mewujudkan pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat agar masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerjasama dengan Polri.
- f. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tujuannya untuk mewujudkan kondisi yang dapat memberi rasa aman, tentram, kepastian dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis.
- g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Tujuannya mewujudkan penegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Sasaran program

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri, Sasarannya adalah menyelenggarakan fungsi manajemen yang berintegritas dan berpihak pada perlindungan masyarakat melalui kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan serta pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegritas antara Mabes Polri, Polda NTB dan Polres Lombok Barat, terdiri dari kegiatan :

1. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri : 12 BLN, 72 OB, 336 OJ
 - a) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : 12 OB, 300 KG, 2 PKT, 400 OG, 12 BLN, 175 OT, 183 OT, 10 OH, 31 OG
 - b) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan : 12 BLN
 2. Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan : 1 PKT
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, Sasarannya adalah untuk terpenuhinya kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa di lingkungan Polres Lombok Barat, terdiri dari kegiatan :
1. Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
 - a) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran : 14.645 M2, 964 UNIT, 174 PCK, 12 BLN, 1 PKT, 145 OT
 - b) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan : 16 UNIT, 1 PKT
 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan : 2 UNIT
- c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri, Sasarannya adalah terciptanya Layanan Pengaduan Masyarakat Pelanggar Kode Etik, Disiplin dan Pengamanan Internal Kewilayahan, terdiri dari kegiatan :
- 1) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan : 1 PKT
 - 2) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Perkantoran : 20 OG, 20 OH
- d. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri sasarannya adalah terciptanya Personel Polri yang Profesionalisme dalam menjalankan setiap bentuk tugas kepolisian, kegiatan tersebut antara lain :
- 1) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan : 1.800 OH, 300 OG, 200 OJ

e. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban, Sasarannya adalah Terciptanya pengembangan strategi keamanan ketertiban dan jaringan intelijen, terdiri dari kegiatan :

- 1) Jumlah Honor PNBP (SKCK Polres) : 24 OB
- 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Polres) : 5 OT
- 3) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing : 30 OH
- 4) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi (Polres) : 323 Giat
- 5) Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres) : 150 OH, 38 GIAT
- 6) Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek) : 381 OH
- 7) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana (PNBP) : 90 OH
- 8) Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak dan Obat Terlarang (PNBP) : 60 OH
- 9) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi (PNBP) : 20 GIAT
- 10) Deteksi Kegiatan Masyarakat (PNBP)
 - Dukungan Pulsa PDA : 24 UNIT
 - Duk Giat Intelejen (Pulbaket) : 125 LAP
- 11) Deteksi Kegiatan Masyarakat Polsek (PNBP) : 1.263 LAP
- 12) Dukungan Pulsa PDA (Polsek) : 12 Unit
- 13) Quick Wins : 4 BLN, 96 OG

f. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, Sasarannya adalah terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media masa, organisasi masa dan lembaga swadaya masyarakat, terdiri dari kegiatan :

- 1) Menyelenggarakan Bimbingan dan Pengayoman Linmas (Polres) dan : 2.040 OG, 2 PKT
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarya (Polres) : 1 PKT
- 3) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarya (Polsek) : 8.500 OG, 6 PKT
- 4) Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Instansi, Swasta, Jasa Pengaman, Tokoh Agama dan LSM (Polres) : 900 OG, 2 PKT
- 5) Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Instansi, Swasta, Jasa Pengaman, Tokoh Agama dan LSM (Polsek) : 3.610 OG, 3 PKT
- 6) Operasional Bhabinkamtibmas : 27.192OH

- 7) Operasi Binmas : 1 PKT
- 8) Focus Group Discussion (FGD) : 4 Giat
- 9) Quick Wins : 1 PKT, 365 OH

g. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Sasarannya adalah terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terdiri dari kegiatan :

1. Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

- 1) Honor PNBP : 12.326 LBR
- 2) Dukungan Operasional Pilkada KLU : 1 PKT
- 3) Dukungan Operasional (Polres) : 3 PKT
- 4) Dukungan Operasional (Polsek) : 14 PKT
- 5) Menyelenggarakan Operasi Kepolisian Khusus Kendali Pusat : 16.450OH, 32 JP
: 13.908 OG
- 6) Menyelenggarakan Turwali RM (Polsek) : 16.836 OG
- 7) Menyelenggarakan Turwali PNBP (Polsek) : 5.490 OG
- 8) Menyelenggarakan Turwali Lantas (Polres) : 4.392 OG
- 9) Menyelenggarakan Turwali Lantas (Polsek) : 24 OB, 12 UB
- 10) Pembinaan Lalu Lintas : 14.274 OG
- 11) Menyelenggarakan Turwali (Polres)

2. Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- 1) Biaya Listrik : 12 BLN
- 2) Biaya Telefon : 12BLN
- 3) ULP Non Organik (Polres) : 13.176 OH
- 4) ULP Non Organik (Polsek) : 22.326OH

3. Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara

- Quick Wins : 26.415OG

4. Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital

- Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian : 4.200 OG

5. Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas

- 1) Honor PNBP : 2.016OB
- 2) Menyelenggarakan Operasi Kepolisian : 12 JP, 10.135 OH
- 3) Pembinaan Lantas : 6.000 OG
- 4) Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lantas (Polres) : 123KSS
- 5) Quick Wins : 1 PKT

- h. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Sasarannya adalah peningkatan pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, Transnasional, kejahatan terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi, terdiri dari kegiatan :
1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan
 - 1) Pengadaan Bahan Makanan dan Perawatan Tahanan (Polres) dan : 12.280 OT
 - 2) Kerjasama, Pembinaan Pengawasan Teknis Penyelidikan dan : 1 PKT
 - 3) Bantuan Teknik Penyelidikan Penyidikan Tindak Pidana dan : 12 KSS

 2. Penindakan Tindak Pidana Umum
 - 1) Tindak Pidana Umum (Polres) : 117 KSS
 - 2) Tindak Pidana Umum (Polsek) : 106 KSS
 - 3) Quick Wins : 3 KSS

 3. Penindakan Tindak Pidana Narkoba
 - Tindak Pidana Narkoba : 12 KSS

 4. Penindakan Tindak Pidana Korupsi
 - Tindak Pidana Korupsi : 2 KSS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Kepolisian Resor Lombok Barat Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilestarikan dalam urusan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Lombok Barat Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada lampiran table Pengukuran Kinerja (PK) Polres Lombok Barat Tahun 2016.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa sasaran strategis yang belum optimal berhasil diwujudkan dalam Tahun 2016 ini. Namun terhadap sasaran maupun target indicator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaian kinerja dimasa akan mendatang.

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator dan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mulai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat beberapa kinerja yang paling utama sebagai criteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Polri telah menetapkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/480/VII/2015 tanggal 24 agustus 2015 Sebagai Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri, maka Polres Lombok Barat telah menyusun Penetapan Indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Lombok Barat.

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada Program Polres Lombok Barat Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1
Table Capaian Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Terwujudnya Penyelidikan dan Pengamanan serta Penggalangan dengan terdeteksinya setiap kegiatan Masyarakat berupa Informasi yang akurat dan tepat waktu dalam rangka pencegahan secara dini tentang terjadinya gangguan Kamtibmas dan mengungkap pelaku Kriminalitas					
	a. Jumlah Pendataan dan Pengawasan terhadap Orang Asing (POA)	OH	30 OH	30	100
	b. Jumlah Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi (Polres)	GT	323 GT	323	100
	c. Jumlah Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)				
	- Deteksi/Penyelidikan Intelijen	OH	150 OH	150	100
	- Kegiatan Penggalangan	GT	38 GT	38	100
	d. Jumlah Deteksi Kegiatan Masyarakat / Lidik dan Pam Intelejen (Polsek)				
	- Polsek Senggigi	OH	48 OH	48	100
	- Polsek Tanjung	OH	48 OH	48	100
	- Polsek Sekotong	OH	34 OH	34	100
	- Polsek Kediri	OH	34 OH	34	100

- Polsek Gerung	OH	34	OH	34	100
- Polsek Gangga	OH	34	OH	34	100
- Polsek Pemenang	OH	34	OH	34	100
- Polsek Lembar	OH	23	OH	23	100
- Polsek Labuapi	OH	23	OH	23	100
- Polsek Bayan	OH	23	OH	23	100
- Polsek Kayangan	OH	23	OH	23	100
- Polsek Kp3 Lembar	OH	23	OH	23	100
e. Jumlah Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana (PNBP)	OH	90	OH	90	100
f. Jumlah Penerbitan, Pendataan dan pengawasan Senpi, Handak (PNBP)	OH	60	OH	60	100
g. Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi (PNBP)	GT	20	GT	20	100
h. Jumlah Deteksi Kegiatan Masyarakat Polres (Pulbaket PNBP)					
- Dukungan Pulsa PDA	UT	24	UT	24	100
- Duk Giat Intelijen	LAP	125	LAP	125	100
i. Jumlah Deteksi Kegiatan Masyarkat Polsek (PNBP)					
- Polsek Senggigi	LAP	12	LAP	12	100
- Polsek Tanjung	LAP	12	LAP	12	100
- Polsek Kediri	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Sekotong	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Gerung	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Gangga	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Pemenang	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Lembar	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Labuapi	LAP	9	LAP	9	100
- Polsek Bayan	LAP	8	LAP	8	100
- Polsek Kayangan	LAP	8	LAP	8	100

	- Polsek Kp3 Lembar	LAP	8 LAP	8	100
	Duk. Pulsa PDA Polsek	UT	12 UT	12	100
Terwujudnya pemberdayaan potensi Masyarakat antara lain Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Politik, Intelektual, Pengusaha, Media Masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat					
	a. Menyelenggarakan Bimbingan Pengayoman dan Linmas (Polres)				
	➤ BINTIBMAS (Penyuluhan Narkoba)				
	- Uang Saku	OG	360 OG	360	100
	- Uang Makan	OG	360 OG	360	100
	- Dana Satuan	OG	300 OG	360	100
	- Sarana Kontak	PKT	1 PKT	1	100
	➤ BINKAMSA				
	- Uang Saku	OG	360 OG	360	100
	- Uang Makan	OG	360 OG	360	100
	- Dana Satuan	OG	300 OG	360	100
	- Sarana Kontak	PKT	1 PKT	1	100
	b. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pam Swakarsa (Polres)	PKT	1 PKT	1	100
	c. Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pam Swakarsa (Polsek)				
	➤ 2 POLSEK URBAN BINTIBMAS				
	- Uang Saku	OG	600 OG	600	100
	- Uang Makan	OG	600 OG	600	100
	- Sarana Kontak	PKT	1 PKT	1	100
	BINKAMSA				
	- Uang Saku	OG	600 OG	600	100

	- Uang Makan	OG	600	OG	600	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	➤ 5 POLSEK RURAL					
	BINTIBMAS					
	- Uang Saku	OG	1.000	OG	1.000	100
	- Uang Makan	OG	1.000	OG	1.000	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	BINKAMSA					
	- Uang Saku	OG	1.000	OG	1.000	100
	- Uang Makan	OG	1.000	OG	1.000	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	➤ 5 POLSEK PRA					
	RURAL					
	BINTIBMAS					
	- Uang Saku	OG	525	OG	525	100
	- Uang Makan	OG	525	OG	525	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	BINKAMSA					
	- Uang Saku	OG	525	OG	525	100
	- Uang Makan	OG	525	OG	525	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	d. Pemberdayaan					
	Kemitraan dengan					
	Lemdik, Masyarakat,					
	Tomas, Instansi,					
	Swasta, Jasa					
	Pengaman, Toga dan					
	LSM (Polres)					
	BINPOLMAS					
	- Uang Saku	OG	240	OG	240	100
	- Uang Makan	OG	240	OG	240	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	BINPOLSUS					
	- Uang Saku	OG	210	OG	210	100
	- Uang Makan	OG	210	OG	210	100
	- Sarana Kontak	PKT	1	PKT	1	100
	e. Pemberdayaan					
	Kemitraan dengan					
	Lemdik, Masyarakat,					
	Tomas, Instansi,					
	Swasta, Jasa					
	Pengaman, Toga dan					
	LSM (Polsek)					

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 POLSEK URBAN BINPOLMAS <ul style="list-style-type: none"> - Uang Saku OG 480 OG 342 100 - Uang Makan OG 480 OG 342 100 - Sarana Kontak PKT 1 PKT 1 100 ➤ 5 POLSEK RURAL BINPOLMAS <ul style="list-style-type: none"> - Uang Saku OG 875 OG 875 100 - Uang Makan OG 875 OG 875 100 - Sarana Kontak PKT 1 PKT 1 100 ➤ 5 POLSEK PRA RURAL BINPOLMAS <ul style="list-style-type: none"> - Uang Saku OG 450 OG 450 100 - Uang Makan OG 450 OG 450 100 - Sarana Kontak PKT 1 PKT 1 100 f. Operasi Binmas PKT 1 PKT 1 100 g. Forum Group Discussion (FGD) GT 4 GT 4 100 				
Terwujudnya Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat dalam rangka Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.					
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi Polri PKT 1 PKT 1 100 b. Jumlah Duk Ops Polres <ul style="list-style-type: none"> - Lombok Barat PKT 1 PKT 1 100 - Lombok Utara PKT 1 PKT 1 100 c. Jumlah Duk Ops Polsek <ul style="list-style-type: none"> - Polsek Senggigi PKT 1 PKT 1 100 - Polsek Tanjung PKT 1 PKT 1 100 - Polsek Kediri PKT 1 PKT 1 100 - Polsek Sekotong PKT 1 PKT 1 100 - Polsek Gerung PKT 1 PKT 1 100 - Polsek Gangga PKT 1 PKT 1 100 - Polsek Pemenang PKT 1 PKT 1 100 				

- Polsek Lembar	PKT	1	PKT	1	100
- Polsek Labuapi	PKT	1	PKT	1	100
- Polsek Bayan	PKT	1	PKT	1	100
- Polsek Kayangan	PKT	1	PKT	1	100
- Polsek Kp3 Lembar	PKT	1	PKT	1	100
- Polsektor Kuripan	PKT	1	PKT	1	100
- Polsektor Gili Indah	PKT	1	PKT	1	100
d. Jumlah Duk Ops Kepolisian					
➤ Ops Kendali Pusat					
- Ops Ketupat Gatarin 2016	OH	125	OH	125	100
	OJ	10	OJ	10	100
	OH	2.000	OH	2.000	100
- Ops Lilin Gatarin 2016	OH	125	OH	125	100
	OJ	10	OJ	10	100
	OH	1.250	OH	1.250	100
➤ Ops Kewilayahan					
- Ops Pekat Gatarin 2016	OH	50	OH	50	100
	OJ	4	OJ	4	100
	OH	700	OH	700	100
- Ops Jaran Gatarin 2016	OH	50	OH	50	100
	OJ	4	OJ	4	100
	OH	700	OH	700	100
- Ops Antik Gatarin 2016	OH	50	OH	50	100
	OJ	4	OJ	4	100
	OH	700	OH	700	100
e. Jumlah Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan, dan Patroli Polsek (RM)					
- Polsek Senggigi	OG	1.464	OG	1.464	100
- Polsek Tanjung	OG	1.464	OG	1.464	100
- Polsek Sekotong	OG	1.098	OG	1.098	100
- Polsek Kediri	OG	1.098	OG	1.098	100
- Polsek Gerung	OG	1.098	OG	1.098	100
- Polsek Gangga	OG	1.098	OG	1.098	100
- Polsek Pemenang	OG	1.098	OG	1.098	100
- Polsek Lembar	OG	1.098	OG	1.098	100

	- Polsek Bayan	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Labuapi	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Kayangan	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek KP3 Lembar	OG	1.098	OG	1.098	100
	f. Jumlah Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan, dan Patroli Polsek (PNBP)					
	- Polsek Senggigi	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Tanjung	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Sekotong	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Kediri	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Gerung	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Gangga	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Pemenang	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Lembar	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Bayan	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Labuapi	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Kayangan	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek KP3 Lembar	OG	732	OG	732	100
	- Polsubsektor Kuripan	OG	732	OG	732	100
	- Polsubsektor Gili Indah	OG	732	OG	732	100
	g. Jumlah Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lantas Polres (PNBP)					
	- Turjawali Lantas	OG	5.490	OG	5.490	100
	h. Jumlah Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lantas Polsek (PNBP)					
	- Polsek Senggigi	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Tanjung	OG	1.098	OG	1.098	100

	- Polsek Kediri	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polsek Pemenang	OG	1.098	OG	1.098	100
	i. Jumlah Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Pengawasan Polres					
	➤ Turjawali Polres (RM)					
	- Polres Lobar	OG	6.222	OG	6.222	100
	- Polres KLU	OG	3.660	OG	3.660	100
	➤ Turjawali Polres (PNBP)					
	- Sat Sabhara	OG	2.928	OG	2.928	100
	- Sat Polair	OG	1.464	OG	1.464	100
	j. Jumlah ULP Non Organik/Jaga Fungsi (Polres)					
	- Polres Lobar	OG	8.418	OG	8.418	100
	- Sat Polair	OG	1.098	OG	1.098	100
	- Polres Kerangka KLU	OG	3.660	OG	3.660	100
	k. Jumlah ULP Non Organik/Jaga Fungsi (Polsek)					
	- Polsek Senggigi	OG	2.196	OG	2.196	100
	- Polsek Tanjung	OG	2.196	OG	2.196	100
	- Polsek Sekotong	OG	1.830	OG	1.830	100
	- Polsek Kediri	OG	1.830	OG	1.830	100
	- Polsek Gerung	OG	1.830	OG	1.830	100
	- Polsek Gangga	OG	1.830	OG	1.830	100
	- Polsek Pemenang	OG	1.830	OG	1.830	100
	- Polsek Lembar	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Labuapi	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Kayangan	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek Bayan	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsek KP3 Lembar	OG	1.464	OG	1.464	100
	- Polsubsektor Kuripan	OG	732	OG	732	100
	- Polsubsektor Gili Indah	OG	732	OG	732	100
	l. Jumlah Ops Kepolisian (PNBP)					

	- Ops Zebra	OH	68	OH	68	100
		JP	4	JP	4	100
		OH	952	OH	952	100
	- Ops Simpatik	OH	69	OH	69	100
		JP	4	JP	4	100
		OH	1.449	OH	1.449	100
	- Ops Patuh	OH	65	OH	65	100
		JP	4	JP	4	100
		OH	910	OH	910	100
	m. Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Lantas (PNBP)					
	- Uang Saku	OG	2.000	OG	2.000	100
	- Dana Satuan	OG	2.000	OG	2.000	100
	- Sarana Kontak	OG	2.000	OG	2.000	100
	n. Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lantas					
	- Laka Lantas Ringan	KSS	47	KSS	47	100
	- Laka Lantas Tidak Menonjol	KSS	74	KSS	74	100
	- Laka Lantas Menonjol	KSS	0	KSS	0	100
	- Kasus Tabrak Lari	KSS	2	KSS	2	100
Peningkatan Pengungkapan dan Penyelesaian Perkara Kejahatan Konvensional, Tradisional, Kejahatan terhadap Kekayaan Negara dan Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi						
	a. Jumlah Pengadaan Bahan Makanan dan Perawatan Tahanan					
	- Biaya Makan Tahanan	OT	6.140	OT	6.140	100
	- Perawatan Tahanan	OT	6.140	OT	6.140	100
	b. Jumlah Kerja sama	PKT	1	PKT	1	100

	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelidikan / biaya Konsultasi dan Koordinasi					
	c. Jumlah Bantuan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana					
	- Otopsi	KSS	10	KSS	10	100
	- Bongkar Kuburan	KSS	2	KSS	2	100
	d. Jumlah Tindak Pidana Umum (Polres)					
	- Kegiatan Sulit	KSS	7	KSS	7	100
	- Kegiatan Sedang	KSS	45	KSS	45	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	53	KSS	53	100
	- Tipiter	KSS	12	KSS	12	100
	e. Jumlah Tindak Pidana Umum (Polsek)					
	POLSEK SENGGIGI					
	- Kegiatan Sedang	KSS	7	KSS	7	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	6	KSS	6	100
	POLSEK TANJUNG					
	- Kegiatan Sedang	KSS	7	KSS	7	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	6	KSS	6	100
	POLSEK SEKOTONG					
	- Kegiatan Sedang	KSS	6	KSS	6	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	5	KSS	5	100
	POLSEK KEDIRI					
	- Kegiatan Sedang	KSS	6	KSS	6	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	5	KSS	5	100
	POLSEK GERUNG					
	- Kegiatan Sedang	KSS	6	KSS	6	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	5	KSS	5	100
	POLSEK GANGGA					
	- Kegiatan Sedang	KSS	6	KSS	2	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	5	KSS	4	100
	POLSEK PEMENANG					
	- Kegiatan Sedang	KSS	6	KSS	6	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	5	KSS	5	100

	POLSEK BAYAN				
	- Kegiatan Sedang	KSS	1 KSS	1	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	4 KSS	4	100
	POLSEK LEMBAR				
	- Kegiatan Sedang	KSS	1 KSS	1	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	4 KSS	4	100
	POLSEK LABUAPI				
	- Kegiatan Sedang	KSS	1 KSS	1	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	4 KSS	4	100
	POLSEK KAYANGAN				
	- Kegiatan Sedang	KSS	1 KSS	1	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	4 KSS	4	100
	POLSEK KP3				
	LEMBAR				
	- Kegiatan Sedang	KSS	1 KSS	1	100
	- Kegiatan Mudah	KSS	4 KSS	4	100
	f. Jumlah Tindak Pidana Narkoba				
	- Penyelidikan Kasus	KSS	5 KSS	5	100
	- Penyidikan Kasus	KSS	7 KSS	7	100
	- Pengembangan Kasus	KSS	0 KSS	0	100
	g. Jumlah Tindak Pidana Korupsi	KSS	2 KSS	2	100

2. Indikator Capaian Kinerja

- 1) Sasaran strategis, tersebarnya pelayanan Polri kepada Masyarakat dengan memperkuat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres bagai kesatuan operasional dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan indicator capaian kinerja antara lain :

Tabel 2
Table Indikator Kinerja Utama
Potensi Gangguan tidak menjadi Gangguan Nyata

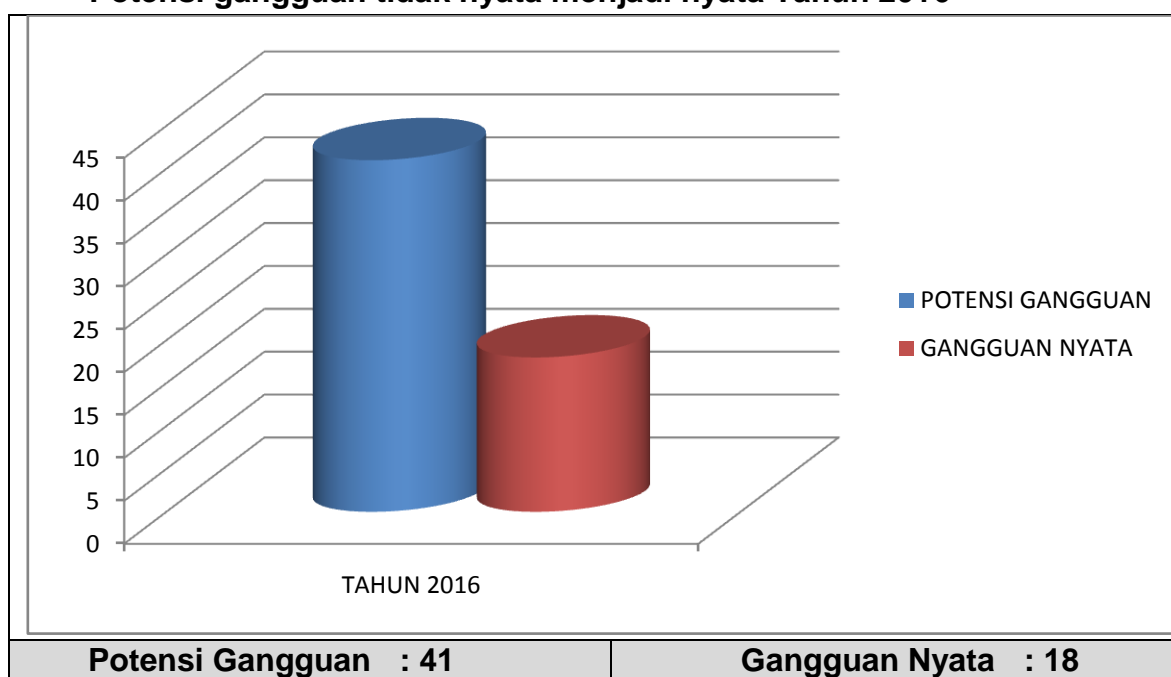
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
a. Prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata.	10 %	20%	200%

Dari penjelasan table 2 diatas, dapat dilihat bahwa Prosentase potensi gangguan menjadi gangguan nyata realisasi mencapai 20% dari alokasi target sebesar 10%, sehingga Capaian Kinerja sebesar 200%.

Tabel 3
Potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata TA. 2016

NO	SUB SATKER JAJARAN POLRES LOBAR	POTENSI GANGGUAN	GANGGUAN NYATA
1	2	3	4
1	Polsek Senggigi	3	2
2	Polsek Tanjung	3	2
3	Polsek Sekotong	3	2
4	Polsek Kediri	3	2
5	Polsek Gerung	3	2
6	Polsek Gangga	3	2
7	Polsek Pemenang	3	2
8	Polsek Lembar	3	2
9	Polsek Bayan	3	2
10	Polsek Labuapi	3	2
11	Polsek Kayangan	3	2
12	Polsek KP3 Lembar	3	2
13	Polsubsektor Kuripan	3	2
14	Polsubsektor Gili Indah	2	2
JUMLAH		41	18

Grafik 1
Potensi gangguan tidak nyata menjadi nyata Tahun 2016



- a). Dari penjelasan table 2 dan grafik 1 diatas dapat di lihat bahwa prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata di wilayah hokum Polres Lombok Barat diantaranya jumlah potensi gangguan sebanyak 41 dan jumlah gangguan nyata sebanyak atau 40 %, target kinerja tahun 2016 sebanyak 15 %. Berdasarkan data tersebut jumlah potensi gangguan menonjol tahun 2016 diantaranya Polsek

Kendala dan hambatan yang masih d hadapi beberapa faktoryang mempengaruhi naiknya angka kriminalitas pada jenis kejahatan curanmor, Penipuan dan curat diantara rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berupaya mengamankan dirinya maupun masyarakat sekitar yang masih apatis terhadap lingkungan.

Usulan pemecahan masalah kegiatan Intelejen antara lain pembinaan jaringan, penggalangan dan deteksi giat masyarakat tepat sasaran, tepat waktu disertai dengan kinerja anggota Intelejen yang senantiasa menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan dan perkembangan masyarakat, disampaikan itu dalam mengantisipasi potensi gangguan senantiasa dilaksanakan terpadu dengan Fungsi lainnya seperti Fungsi Binmas dalam memberikan penyuluhan (Prefentif dan Preematif), Fungsi Sabhara kegiatan patrol dialogis didaerah rawan kamtibmas serta dengan Fungsi Reserse dalam penegakan hukum.

Tabel 4
Table Indikator Kinerja Utama
Prosentase penurunan daerah Rawan Kamtibmas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
b. Prosentase penurunan daerah rawan kamtibmas	30 %	2,8 %	9,3 %

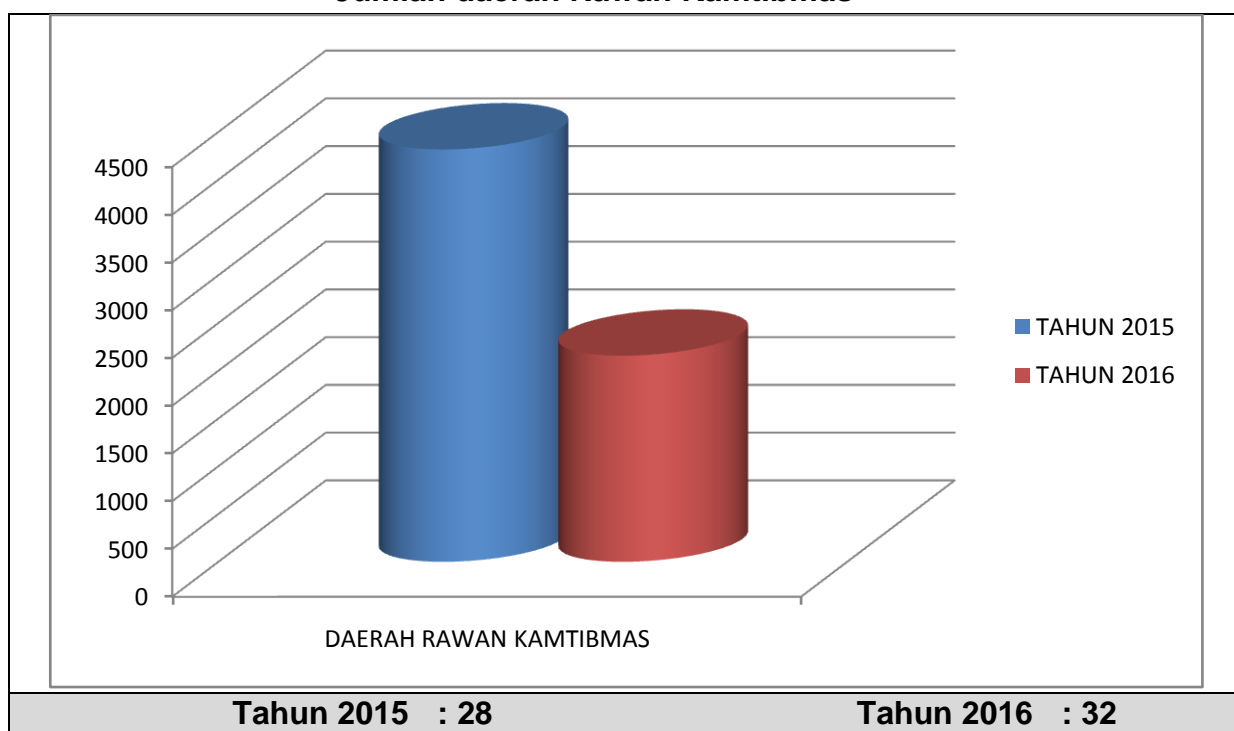
Dari penjelasan table 4 , dapat dilihat bahwa prosentase penurunan daerah rawan kamtibmas realisasi mencapai 2,8 % dari alokasi targetsebesar 30 %, sehingga capaian kinerja sebesar 9,3 %.

Tabel 5
Jumlah daerah rawan kamtibmas

NO	SUB SATKER JAJARAN POLRES LOBAR	2015	2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Polsek Senggigi	2	3
2	Polsek Tanjung	2	3
3	Polsek Sekotong	2	3

4	Polsek Kediri	2	3
5	Polsek Gerung	2	3
6	Polsek Gangga	2	2
7	Polsek Pemenang	2	3
8	Polsek Lembar	2	2
9	Polsek Bayan	2	3
10	Polsek Labuapi	2	3
11	Polsek Kayangan	2	1
12	Polsek KP3 Lembar	2	1
13	Polsubsektor Kuripan	2	1
14	Polsubsektor Gili Indah	2	1
JUMLAH		28	32

Grafik 2
Jumlah daerah Rawan Kamtibmas



- b) Dari penjelasan table 5 dan grafik 2 diatas dapat dilihat bahwa Prosentase penurunan daerah rawan kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Barat diantaranya jumlah daerah rawan kamtibmas Tahun 2015 sebanyak 1.330 dan jumlah daerah rawan kamtibmas Tahun 2016 sebanyak 1.458 atau 2.8 % sehingga target kinerja Tahun 2016 sebanyak 30 % . Berdasarkan data tersebut jumlah rawan kamtibmas yang menonjol Tahun 2016 diantaranya Polsek

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi factor kependulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah.

Usulan Pemecahan masalah pemberdayaan Fungsi Sabhara, optimalisasi Bhabinkamtibmas dan penepatan kring Serse oleh jajaran Fungsi Reskrim dan

Fungsi Narkoba serta penggalaman jaringan Fungsi Intelkam dan menekan potensi gangguan untuk tidak menjadi gangguan nyata ditambah dengan mengkuratkan Patroli dan Binmas.

Tabel 6
Tabel Indikator Kinerja Utama
Prosentase penurunan wilayah konflik Sosial

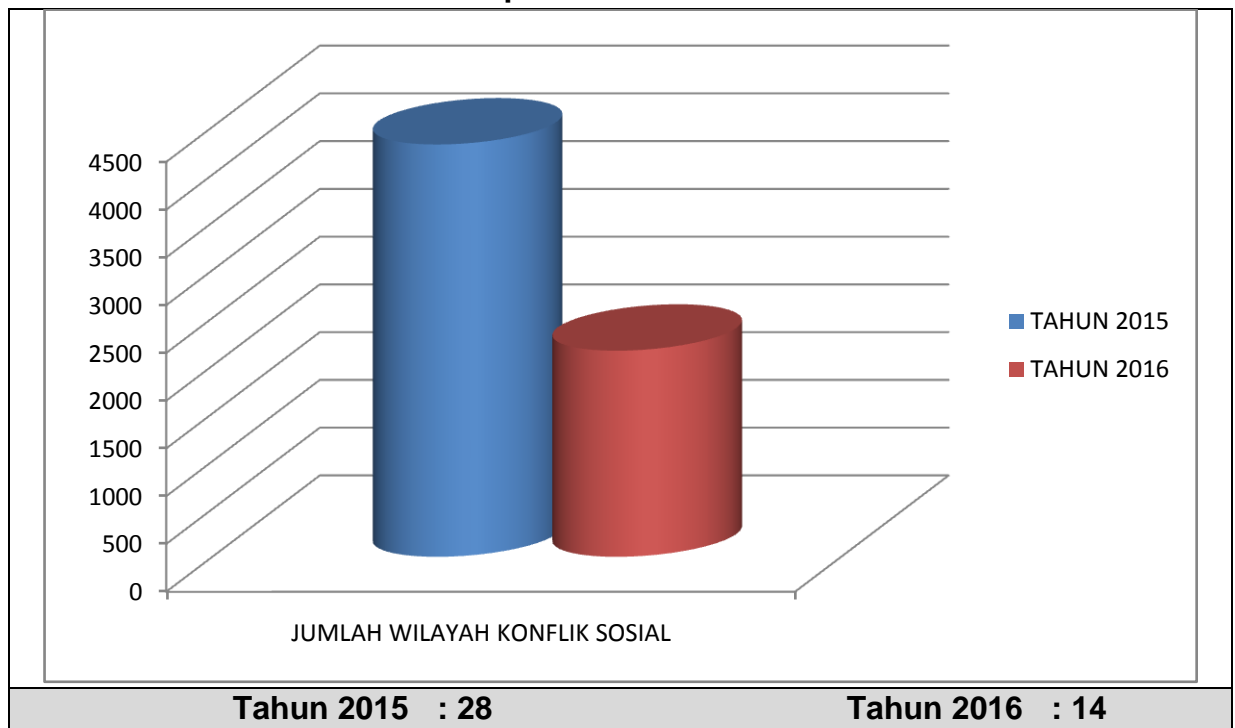
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
c. Prosentase penurunan wilayah konflik sosial	20 %	3,18 %	15,9 %

Dari penjelasan table 6 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase penurunan daerah rawan kamtibmas realisasi mencapai 2,8 % dari alokasi target sebesar 30 %, sehingga capaian kinerja sebesar 9,3 %

Tabel 7
Jumlah wilayah Konflik Sosial

NO	SUB SATKER JAJARAN POLRES LOBAR	2015	2016
1	2	3	4
1	Polsek Senggigi	2	1
2	Polsek Tanjung	2	1
3	Polsek Sekotong	2	1
4	Polsek Kediri	2	1
5	Polsek Gerung	2	1
6	Polsek Gangga	2	1
7	Polsek Pemenang	2	1
8	Polsek Lembar	2	1
9	Polsek Bayan	2	1
10	Polsek Labuapi	2	1
11	Polsek Kayangan	2	1
12	Polsek KP3 Lembar	2	1
13	Polsubsektor Kuripan	2	1
14	Polsubsektor Gili Indah	2	1
JUMLAH		28	14

Grafik3
Jumlah penurunan konflik



c) Dari penjelasan table 7 dan grafik 3 diatas dapat dilihat bahwa Prosentase penurunan wilayah konflik social di wilayah hukum Polres Lombok Barat diantaranya jumlah daerah rawan kamtibmas Tahun 2015 sebanyak 152 dan jumlah dan daerah rawan kamtibmas tahun 2016 sebanyak 157 atau 3,18% sehingga target kinerja Tahun 2016 sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut jumlah rawan kamtibmas yang menonjol tahun 2016.

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi jumlah riil personel belum tercukupi dari DSP yang ada sesuai perkap 23 tahun 2010.

Usulan pemecahan masalah pemberdayaan fungsi Binmas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan serta pemberdayaan FKPM yang ada karena dipandang sangat efektif dalam mencegah konflik social.

2) Sasaran Strategis, terwujudnya penyebaran personel diseluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan indicator capaian kinerja antara lain :

Tabel 8
Tabel Indikator Kinerja Utama
Prosentase penyebaran personel di masing-masing Polsek

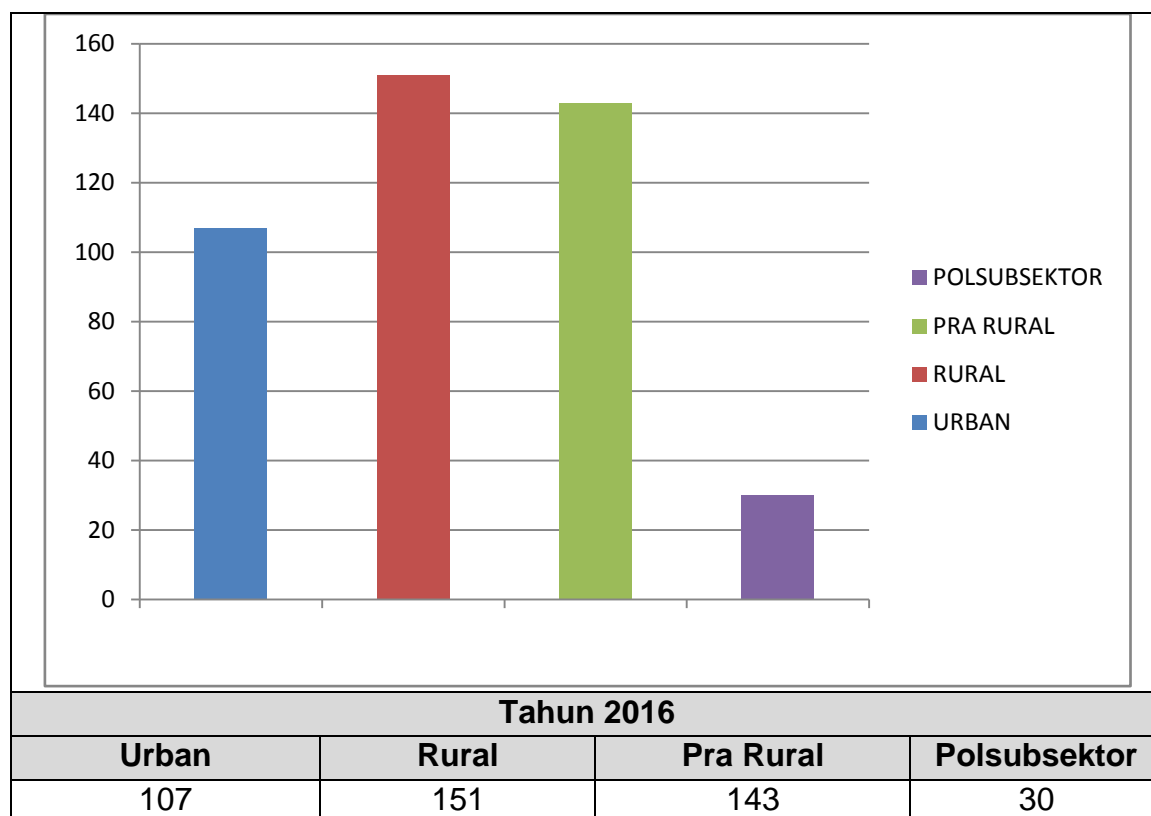
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
a. Prosentase penyebaran personel di masing-masing Polsek.	50%	55,4%	110,8%

Dari penjelasan table diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran personel di masing-masing Polsek realisasi mencapai 55,4% dari alokasi target sebesar 50%, sehingga capaian kinerja sebesar 110,8%.

Table 9
Penyebaran personel di masing-masing Polsek

NO	PERSONIL POLSEK	TA. 2016
1	2	3
1	Urban	107
	- Polsek Tanjung	47
	- Polsek Senggigi	60
2	Rural	151
	- Polsek Sekotong	29
	- Polsek Gerung	39
	- Polsek Kediri	36
	- Polsek Gangga	26
	- Polsek Bayan	21
3	Pra Rural	143
	- Polsek Lembar	29
	- Polsek Labuapi	36
	- Polsek Kayangan	22
	- Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar	25
	- Polsek Pemenang	31
4	Polsubsektor	30
	- Polsubsektor Kuripan	18
	- Polsubsektor Gili Indah	12
JUMLAH		431

Grafik 4
Penyebaran personel di masing-masing polsek tahun 2016



- a) Dari penjelasan table 9 dan grafik 4 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penyebaran personel dimasing-masing Polsek sebanyak 431 atau 55,4%, sehingga target penyebaran personel dimasing-masing Polsek Tahun 2016 sebanyak 50%, diantaranya Polsek Urban sebanyak 107, Polsek Rural sebanyak 151, Polsek Pra Rural sebanyak 143, dan Polsebsektor sebanyak 30.

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi kurangnya penyebaran personel di masing-masing Polsek dikarenakan jumlah personel yang mengawakili Polsek tidak memenuhi DSP yang ditetapkan.

Usulan pemecahan masalah melakukan pergeseran personil Polri disesuaikan dengan DSP dan pengkajian personil maupun Polsek.

Tabel 10
Tabel Indikator Kinerja Utama
Prosentase jumlah Polsek di Kecamatan

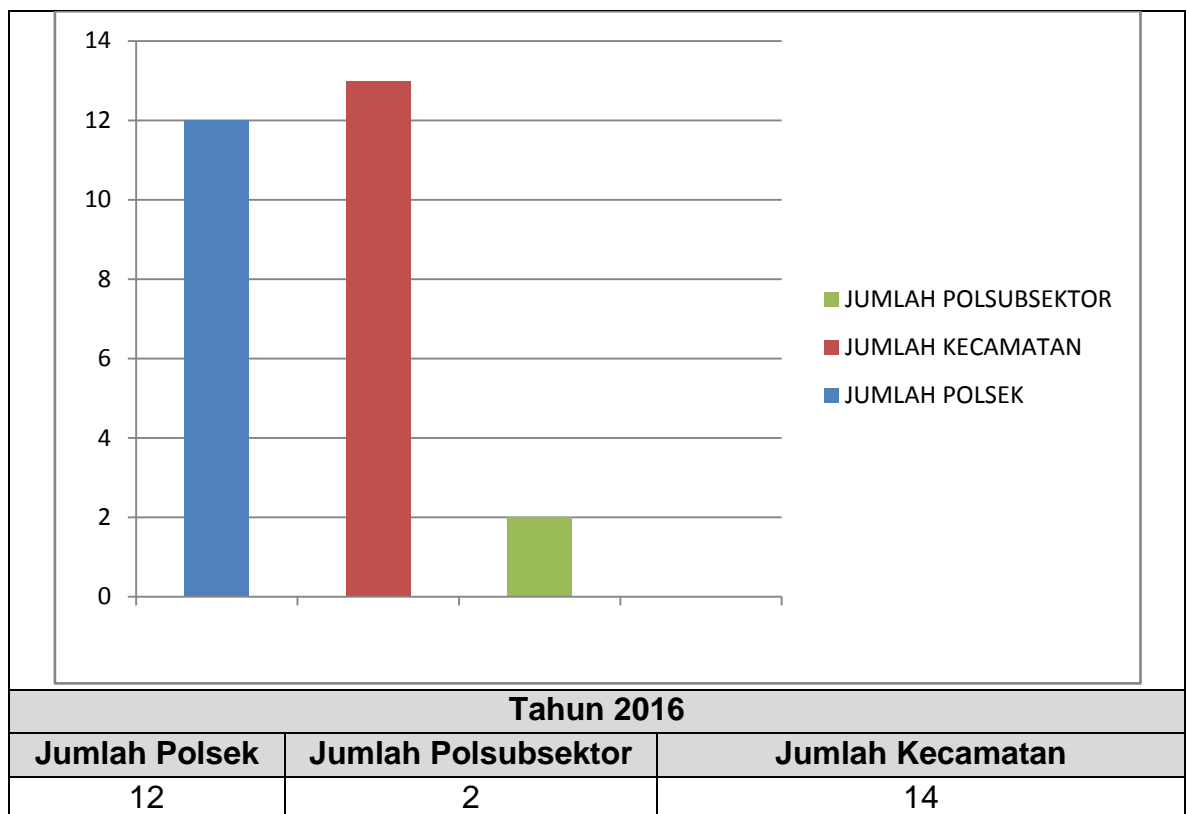
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
b. Prosentase jumlah Polsek di Kecamatan	95%	98,68%	103,87%

Dari Penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Prosentase jumlah Polsek di Kecamatan realisasi mencapai 98,68% dari alokasi target sebesar 95%, sehingga capaian kinerja 103,87%.

Tabel 11
Penyebaran Personil di masing-masing Polsek

NO	POLSEK	TA. 2016
1	2	3
1	Jumlah Polsek	12
2	Jumlah Polsubsektor	2
2	Jumlah Kecamatan	14
3	Kekurangan Polsek	2

Grafik 5
Jumlah Polsek di Kecamatan



- b) Dari penjelasan table 11 dan grafik 5, dapat dilihat bahwa Prosentase jumlah Polsek Di Kecamatan diantaranya Jumlah Polsek pada Polres Lombok Barat sebanyak 12, Polsubsektor sebanyak 2, jumlah Kecamatan 14 dan Kekurangan Polsek sebanyak 2.

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi dalam pemenuhan jumlah Polsek yang terbentuk pada setiap kecamatan adalah jumlah personil yang mewakili Polsek tidak memenuhi DSP yang ditetapkan.

Usulan pemecahan masalah melakukan pengkajian jumlah Polsek yang akan dibentuk.

Tabel 12
Tabel Indikator Kinerja Utama
Prosentase jumlah Bhabinkamtibmas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
c. Prosentase Jumlah Bhabinkamtibmas	60%	98,34%	163,9%

Dari penjelasan table 12 diatas, dapat dilihat bahwa Prosentase jumlah Bhabinkamtibmas realisasi mencapai 98, 68% dari alokasi target sebesar 60%. Sehingga capaian kinerja sebesar 163,9%

Tabel 13
Jumlah Bhabinkamtibmas

NO	SATKER	POLSEK	JUMLAH DESA	JUMLAH BHABINKAMTIBMAS	KET
1	2	3	4	5	6
	POLRES LOBAR				
1		- Polsek Sekotong	9	9	
2		- Polsek Lembar	10	10	
3		- Polsek Gerung	14	14	
4		- Polsek Kediri	10	10	
5		- Polsek Labuapi	12	12	
6		- Polsek Senggigi	9	9	
7		- Polsek Pemenang	3	3	
8		- Polsek Tanjung	7	7	
9		- Polsek Gangga	5	5	
10		- Polsek Kayangan	8	8	
11		- Polsek Bayan	9	9	
12		- Polsubsektor Kuripan	6	6	
13		- Polsubsektor Gili Indah	1	1	
JUMLAH			103	103	

- c) Dari penjelasan table 13, dapat dilihat bahwa prosentase jumlah Bhabinkamtibmas diantaranya jumlah polsek pada Polres Lombok Barat sebanyak 103, jumlah desa / kelurahan sebanyak 103.

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi terbatasnya jumlah personil polri sehingga banyak bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugas rangkap untuk pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan

Usulan pemecahan masalah meningkatkan kemampuan petugas bhabinkamtibmas dan meningkatkan kegiatan bimbingan serta penyuluhan guna menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas.

- 3) Sasaran strategis, terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntable, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dengan indicator capaian kinerja antara lain :

Table 14
Table Indikator Kinerja Utama
Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana	70 %	81%	81%

Dari penjelasan table 14 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana realisasi mencapai 81% dari alokasi target sebesar 70%, sehingga capaian kinerja sebesar 81%.

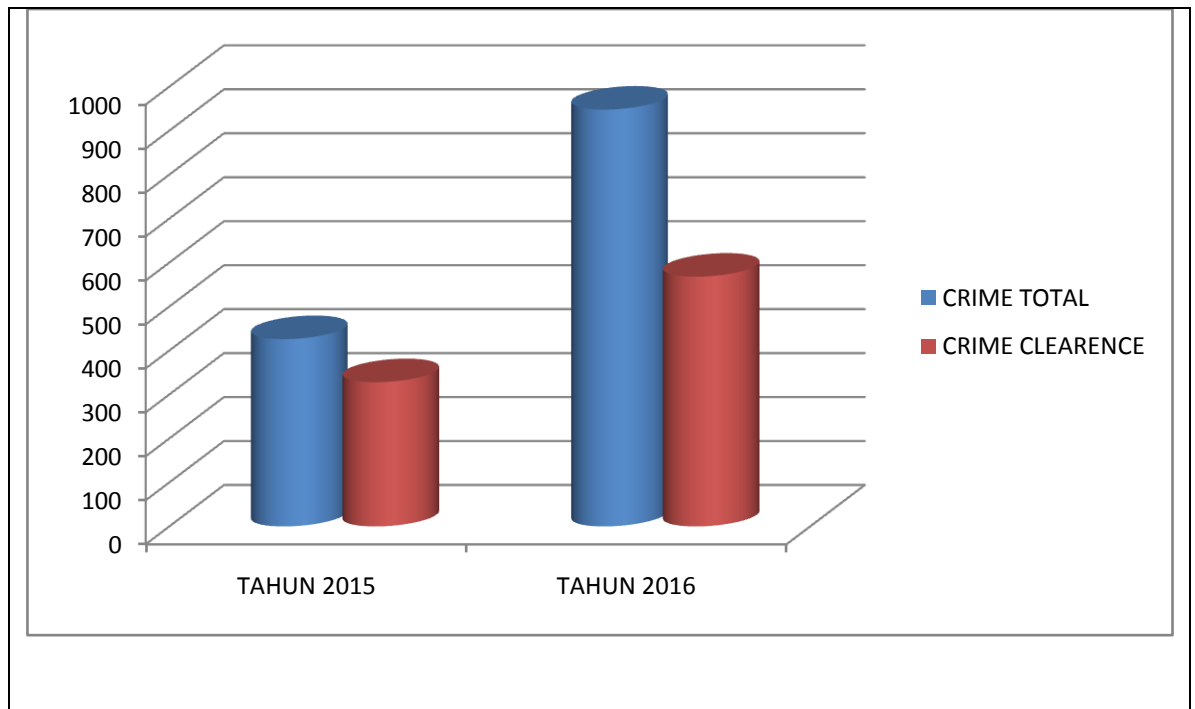
Table 15
Table Crame Total tahun 2015 dan 2016

NO	JUMLAH CRIME TOTAL	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	2015	2016
	426	948

Table 16
Table Crame Clearance tahun 2015 dan 2016

NO	JUMLAH CRIME CLEARENCE	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	2015	2016
	328	568

Grafik 6
Crime Total dan Crime Clearance tahun 2015 dan 2016



- a) Dari penjelasan table 15, 16 dan grafik 6 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana tahun 2016 sebanyak 948 kasus dan Polres Lombok Barat baru berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana sebanyak 568 kasus atau 59,92% sehingga masih kekurangan 40,08%. Berdasarkan data tersebut maka sebanyak 380 kasus menjadi tunggakan penyelesaian perkara untuk ditangani tahun 2016.

Kendala dari hambatan yang masih dihadapi dalam pengungkapan kasus-kasus yang terjadi diantaranya adalah jumlah penyidik yang masih terbatas khususnya penyidik di tingkat Polsek sehingga kasusus yang ditangani tidak semua bias selesai sampai tuntas sehingga penyelesaiannya dilimpahkan kepada penyidikan Polres padahal di tingkat Polres sendiri banyak kasus yang perlu ditangani secara cepat terlebih lagi kasus yang menjadi sorotan masyarakat.

Hambatan lain dalam pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana di jajaran Polres Lombok Barat diantaranya kualitas sumber daya manusia penyidik.

Upaya Polres Lombok Barat yang telah dilaksanakan dalam pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana tersebut diantaranya adalah melaksanakan pembinaan fungsi teknis reserse di masing-masing sayuan fungsi/satuan wilayah dengan materi trend kejahatan yang terjadi dan materi pendukung

lainnya sehingga diharapkan dengan pembinaan fungsi teknis tersebut dapat meningkatkan kinerja fungsi Reserse.

Upaya lainnya adalah menjalin sinergitas dengan unsure penegak hokum lainnya diantara dengan jaksa penuntut umum, hal ini dimaksudkan agar pemberkasan kasus dapat diselesaikan secara cepat dan tersangka dan barang bukti dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Guna meningkatkan kinerja fungsi Reskrim dan sesuai dengan kebijakan, Polres Lombok Barat juga memberikan asistensi kepada Polres yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus terutama kasus besar yang menjadi sorotan public dan Polres Lombok Barat senantiasa memberikan back up kepada satuan wilayah agar kasus dapat diselesaikan secara cepat dan transparan

Tabel 17
Tabel Indikator Kinerja Utama
Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

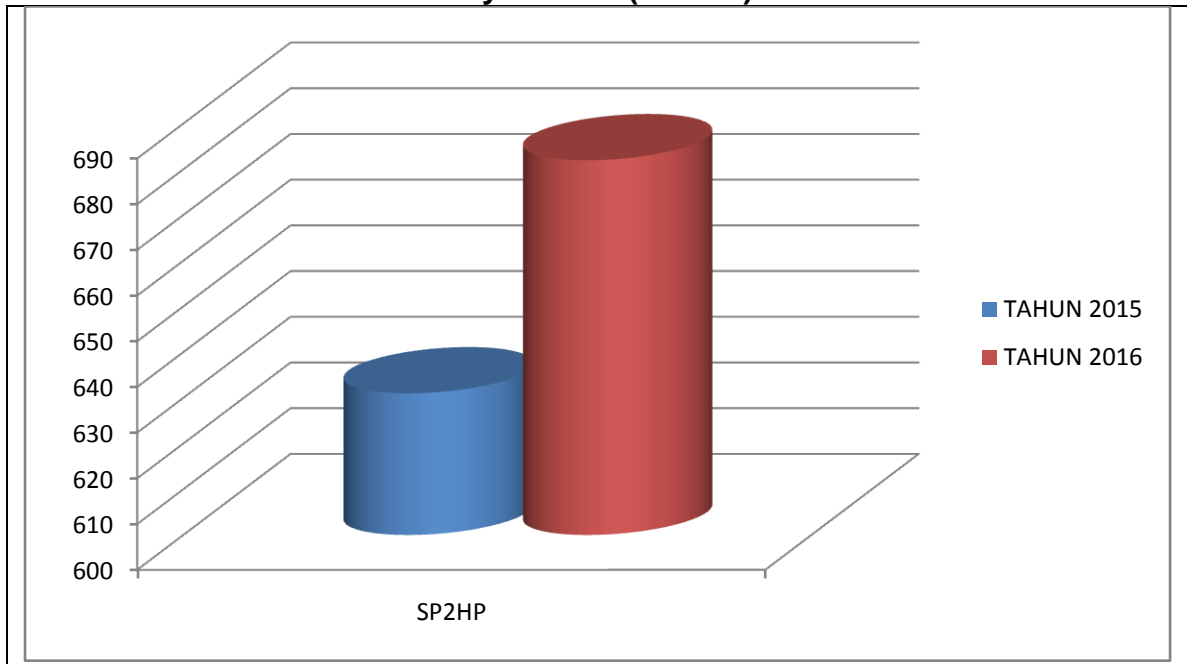
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
b. Indikator surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).	70%	82%	82%

Dari penjelasan table 17 diatas, dapat dilihat bahwa Prosentase surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) realisasi mencapai 82% dari alokasi target 70%. Sehingga capaian kinerja sebesar 82%.

Tabel 18
Jumlah Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP)

NO	SATKER	2015	2016
1	2	3	4
1	Polres Lobar	337	789

Grafik 7
Jumlah Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan (SP2HP)



b) Dari penjelasan table 18 dan grafik 7 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) diantaranya jumlah SP2HP tahun 2015 sebanyak 682 dan tahun 2016 Sebanyak 682.

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi SP2KP yang dikirim kepada korban dan pelapor terkadang ada yang dikembalikan dengan alasan alamat tidak dikenal (pelapor memberikan data/identitas yang lama. Padahal sudah pindah) serta SP2HP yang disampaikan terkadang tidak sesuai yang diharapkan pelapor contoh kasus yang dilaporkan belum cukup bukti untuk pidana.

Usulan pemecahan masalah sebelum menyampaikan SP2HP meminta / mengecek identitas yang diberikan kepada penyidik dan memberikan pengertian atau menyedikan ruang pengaduan complain masyarakat.

- 4) Sasaran strategis, terwujudnya peningkatan pelayanan Kepolisian yang transparan dan akuntabel, dengan indikator capaian kinerja antara lain.

Tabel 19
Tabel Indikator Kinerja Utama
Prosentase ketepatan datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Sesuai standard

NO	JUMLAH KETEPATAN	DATANG KE TKP
	2015	2016
1	21	30

Capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2016 secara umum telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah / pembangunan nasional. Meskipun

dalam kurun waktu tersebut, muncul berbagai kasus yang menonjol yang mempunyai dampak luas, meresahkan masyarakat dalam bentuk kasus – kasus yang merugikan Negara, namun dampak tersebut dapat diredam perkembangan.

Meskipun di beberapa wilayah terjadi konflik horizontal, namun kegiatan tersebut tidak muncul dan dapat diisolir sehingga tidak mempengaruhi situasi kamtibmas di wilayah Polres Lombok Barat. Dalam rangka pembangunan kekuatan dan kemampuan polri telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pembangunan personel, pengembangan kemampuan pelayanan Community Policing, perawatan alat fungsional dan pembangunan lainnya.

Pengaruh perkembangan lingkungan Strategik dalam memberikan peluang perkembangan Trans Nasional Crime, munculnya berbagai kegiatan masyarakat yang berdampak pada perkembangan gangguan kamtibmas. Di sisi lain Polres Lombok Barat masih dihadapkan dalam permasalahan intern diantaranya masih terbatasnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, dan masih diperlukannya peningkatan profesionalisme anggota Polres Lombok Barat.

Dalam peningkatan kualitas tersebut, telah diawali dengan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada dalam sistem ketatalaksanaan yang dianut, disamping itu juga Polres Lombok Barat telah melaksanakan dan mempedomani Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut di laksanakan kini saatnya seluruh Personel Polres Lombok Barat diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan peningkatan kinerja personel Polres Lombok Barat adalah agar Polri Polres Lombok Barat dipercaya masyarakat. Polres Lombok Barat menyadari bahwa kinerja Polri Polres Lombok Barat akan sulit berubah apabila tidak mampu melaksanakan tranformasi sistem Polri dari sistem yang berorientasi kekuasaan kearah sistem yang berorientasi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Polres Lombok Barat akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan harapan masyarakat.

Perubahan yang dilakukan hendaknya dapat menuju kepada manajemen yang efisien, efektif dan akuntabel, sehingga semua Subsatker yang ada di jajaran Polres Lombok Barat dapat mengelola anggaran berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Negara dan Masyarakat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polres Lombok Barat.

Disamping itu juga dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi, mewajibkan Polri untuk menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, sehingga kinerja dan penyerapan anggaran akan tampak dalam laporan tersebut.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 berarti Polres Lombok Barat telah melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun pencapaian kinerja Polres Lombok Barat untuk Tahun Anggaran 2016 dituangkan kedalam Laporan Kinerja Polres Lombok Barat Tahun Anggaran 2016.

B. Realisasi Anggaran

Dalam penyusunan pelaporan keuangan yang terkait dengan neraca keuangan, transaksi keuangan di Polres Lombok Barat telah disesuaikan dengan transaksi keuangan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, mengingat sistem akuntansi pemerintah sudah diberlakukan di lingkungan Polri. Penyusunan pelaporan akuntabilitas keuangan mengacu pada neraca sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan akuntansi pada pembuatan pelaporan neraca Tahun 2016 ini mendasari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum oleh pemerintah. Adapun realisasi anggaran Polres Lombok Barat Tahun 2016 dengan jumlah Pagu Awal DIPA Polres Lombok Timur sebesar Rp 71.664.717.000,- dan Jumlah Pagu Revisi (Revisi ke 10 tanggal 30 Desember 2016) sebesar: Rp.85.367.348.000.- Pagu dan realisasi anggaran keseluruhan Program Program Polres Lombok Timur T.A 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Anggaran Per Belanja T.A. 2016 Polres Lombok Barat

NO	URAIAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	52.550.619.000	66.871.103.000	69.176.581.362	(-) 2.305.478.362	103
2	Belanja Barang	19.084.098.000	15.634.051.000	15.629.174.958	4.876.042	99

3	Belanja Modal	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100
JUMLAH		71.664.717.000	82.535.154.000	84.835.756.320	(-) 2.300.602.320	103

Tabel 21
Realisasi Anggaran Per Sumber Dana T.A 2016 Polres Lombok Barat

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	SISA	KE T
1	2	3	4	5	6	7
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri - Pembayaran gaji dan tunjangan - penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran	52.550.619.000 696.479.000	66.871.103.000 553.643.000	69.176.581.362 553.294.893	(-) 2.305.478.362 348.107	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri - penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran - Penyelenggaraan Operasional Pertahanan dan Keamanan - Penyelenggaraan Pengadaan Materil	4.305.225.000 500.650.000 30.000.000	3.271.310.000 500.650.000 30.000.000	3.267.249.879 500.648.150 30.000.000	4.060.121 850 0	
3	Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri - Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas kewilayahan - Penyelenggaraan Propam Kewilayahan	29.000.000 44.050.000	26.000.000 34.050.000	26.000.000 34.050.000	0 0	
4	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri - Penyelenggaraan	112.250.000	112.250.000	112.250.000	0	

	Pendidikan dan Latihan Polri					
5	Program pengembangan strategi kemandirian dan ketertiban - Layanan Keamanan dan ketertiban	1.606.734.000	1.205.850.000	1.205.850.000	0	
6	Program pemberdayaan potensi keamanan - Pembinaan Potensi Keamanan	2.334.920.000	2.090.204.000	2.090.204.000	0	
7	Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masy. - Bin Har Kamtibwil - Duk Harkamtibmas - Bin Yan Fungsi Sabhara - Kat Yan Kamsel Mas Bid Lantas	4.314.954.000 1.087.902.000 1.399.995.000 434.004.000	3.764.264.000 853.182.000 1.027.239.000 434.004.000	3.764.264.000 852.715.036 1.027.239.000 434.004.000	0 466.964 0 0	
8	Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana - Penanganan Tindak Pidana Kewilayahan - Penanganan Tindak Pidana Umum - Penindakan Tindak Pidana Narkoba - Penindakan Tindak Pidana Korupsi	228.558.000 1.223.541.000 79.794.000 416.142.000	228.558.000 1.188.532.000 79.794.000 264.521.000	228.558.000 1.188.532.000 79.794.000 264.521.000	0 0 0 0	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas-tugas Polres Lombok Barat dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) serta Penetapan Kinerja Polres Lombok Barat Tahun 2016 telah dapat dilaksanakan oleh seluruh Satker, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polres Lombok Barat.
2. Pada Tahun 2016 dalam program dan kegiatan serta sasaran dalam bidang pengembangan kekuatan Polri telah dilaksanakan sesuai dengan quota yang telah ditentukan dari Polda NTB untuk mengisi restrukturisasi Polres Lombok Barat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Polri Polres Lombok Barat melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien ketersediaan SDM yang professional, bermoral dan modern, peningkatan system pengawasan internal, penerapan budaya kerja yang bersifat pelayanan yang pada akhirnya mampu mewujudkan Polri Polres Lombok Barat selaku pemelihara Kamtibmas dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat Lombok Barat.

B. Saran dan Tindak Lanjut yang akan dilakukan pada tahun mendatang

1. Meningkatkan kerjasama / koordinasi antar Instansi terkait dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di wilayah Lombok Barat dalam upaya penanganan konflik social (perang kampung) yang sering terjadi di wilayah Lombok Barat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan telah dilakukan melalui pelayanan pada tingkat Polsek dan Polsubsektor jajaran Polres Lombok Barat yang pada saat ini memiliki fungsi-fungsi pelayanan yang relatif memadai.
3. Peningkatan transparansi pelayanan tindak pidana dengan mengoptimalkan pelayanan Quick Wins Reserse melalui pemberian SP2HP.

4. Mendorong Pemenuhan peningkatan besaran tunjangan kinerja / remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi Polri guna untuk lebih menjamin dedikasi personil Polri dalam rangka melayani masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Lombok Barat TA 2016 disusun diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Lombok Barat. Dalam penyusunan laporan ini secara jujur sangat disadari belum sempurna dan dapat menyajikan prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Polres Lombok Barat selama satu tahun, dan pada tahun mendatang Polres Lombok Barat akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Gerung, 25 Januari 2017



